

## Analisis Strategi Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi Berbasis Transformasi Digital

Maria Regina Nansi<sup>1</sup>, Muhammad Yusuf<sup>2</sup>, Anggun Septi N<sup>3</sup>, Irfan Mustofa<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Institut Sains & Teknologi Akprind Yogyakarta

Jl. Kalisahak No 28 Balapan Yogyakarta, e-mail: [marianansi@akprind.ac.id](mailto:marianansi@akprind.ac.id)

<sup>2</sup>Institut Sains & Teknologi Akprind Yogyakarta

Jl. Kalisahak No 28 Balapan Yogyakarta, e-mail: [yusuf@akprind.ac.id](mailto:yusuf@akprind.ac.id)

<sup>3</sup>Institut Sains & Teknologi Akprind Yogyakarta

Jl. Kalisahak No 28 Balapan Yogyakarta, e-mail: [anggunsepti674@gmail.com](mailto:anggunsepti674@gmail.com)

<sup>4</sup>Institut Sains & Teknologi Akprind Yogyakarta

Jl. Kalisahak No 28 Balapan Yogyakarta, e-mail: [irfantofa15pan@gmail.com](mailto:irfantofa15pan@gmail.com)

### ARTICLE INFO

Article history:

Received 23 Januari 2023

Received in revised form 31 Maret 2024

Accepted 30 Juli 2024

Available online Desember 2024

### ABSTRACT

This research aims to identify strategies and implementation results carried out by the Indonesian government to restore economic conditions during and especially after the pandemic. This type of research is included in quantitative-qualitative research with the qualitative variables in this research being the level of achievement of economic growth and economic recovery strategies, respectively. Primary data is data from interviews and secondary data is existing publication sources. The results show that the strategy implemented by the government, namely protecting, implementing PEN, capital participation, placing funds, and guarantee schemes has succeeded in restoring the condition of the Indonesian economy, especially entering the digitalization of the post-pandemic economy.

**Keywords:** *economic recovery strategy, policy implementation, digitalization of the economy*

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi strategi dan hasil implementasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memulihkan kondisi perekonomian selama dan terutama pasca pandemi. Penelitian yang dilakukan termasuk dalam penelitian kuantitatif-kualitatif dengan variabel kualitatif dalam penelitian ini masing-masing adalah tingkat ketercapaian pertumbuhan ekonomi dan strategi pemulihan ekonomi. Data primer berupa data hasil wawancara sedangkan data sekunder merupakan sumber publikasi yang sudah ada. Hasil penelitian menunjukkan jenis strategi yang dilakukan pemerintah adalah melindungi, pelaksanaan PEN, penyertaan modal, penempatan dana, dan skema penjaminan dan pelaksanaan strategi ini berhasil memulihkan kondisi perekonomian Indonesia terutama memasuki digitalisasi perekonomian pasca pandemi.

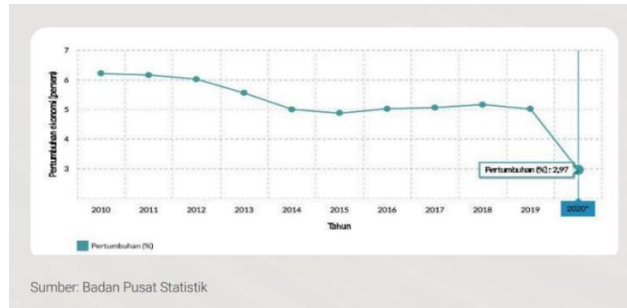
**Kata Kunci:** strategi pemulihan ekonomi, implementasi kebijakan, digitalisasi perekonomian

Received 23 Januari 2023; Revised 31 Maret 2024; Accepted 30 Juli 2024

\*Corresponding author, e-mail address: [marianansi@akprind.ac.id](mailto:marianansi@akprind.ac.id)

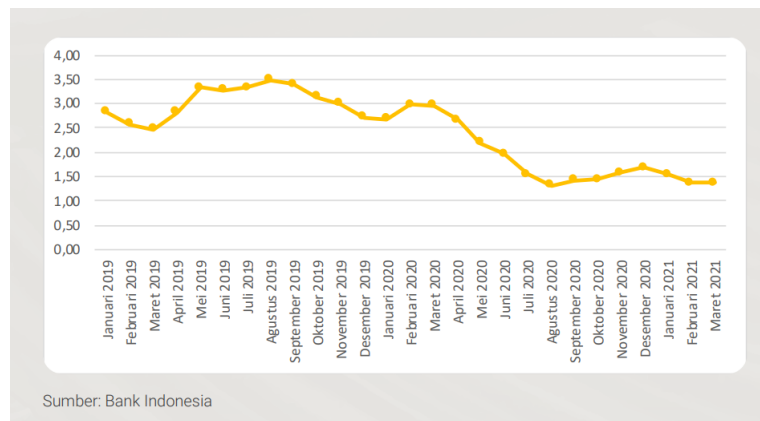
## 1. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap kehidupan manusia termasuk di bidang ekonomi dan sistem keuangan. Dunia mengalami perlambatan ekonomi karena pembatasan aktivitas perdagangan secara drastis. Negara-negara di dunia mengalami resesi sistemik.



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2010-2020  
Sumber: Bank Indonesia 2020

Menurut Farhanah (2020) pertumbuhan ekonomi domestik berslope negatif karena pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia mencanangkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2020 berkisar antara 5,3 – 5,6 persen. Namun target ini sulit dicapai dengan terus meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyebabkan perekonomian Indonesia lebih terpuruk seiring kebijakan-kebijakan yang berubah-ubah karena menyesuaikan dengan kondisi penularan COVID-19. Eskalasi kasus COVID-19 dan kebijakan PSBB memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2020 yang berkontraksi sebesar 5,32 persen (y-on-y).



Gambar 2. Tingkat Inflasi Januari 2019-Maret 2021  
Sumber: Bank Indonesia 2020

Pada tahun 2019 inflasi Indonesia tercatat 3,02 persen sedangkan tahun 2020 inflasi tercatat sebesar 1,60 persen atau lebih rendah dari tahun 2019 dikarenakan permintaan masyarakat yang menurun akibat pandemi dan nilai tukar yang menurun. Daya beli masyarakat secara luas menurun sehingga mengakibatkan deflasi dan menurunnya.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Permasalahan penelitian mengulas pada tepat atau tidaknya kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia tentang kebijakan fiskal dan moneter yang diambil dalam rangka menstabilkan perekonomian bangsa. Pemerintah mengupayakan penanganan mendasar yakni pengendalian virus COVID-19 agar tidak berkembang sehingga masyarakat tetap sehat dan aktif dalam kegiatan ekonomi. Dengan tetap berjalannya kegiatannya perekonomian maka daya beli masyarakat dipertahankan agar tidak mengalami dampak negatif ekonomi yang lebih besar.

Pemerintah menetapkan fungsi anggaran pendapatan dan belanja negara yakni alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pemerintah juga mengupayakan bantuan yang diutamakan untuk pelaku ekonomi dan masyarakat kecil yang terdampak pandemi, termasuk masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.

Penelitian ini hanya pada lingkup aktifitas strategi pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi yang melibatkan pelaku usaha/UMKM sebagai narasumber terkait implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. Fokus penelitian hanya pada strategi pemulihan ekonomi saja, penelitian tidak berlanjut pada implikasi dan dampak kebijakan pada ruang lingkup lain seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data selama periode tahun 2019 sampai dengan 2020.

Adapun tujuan dari pada penelitian ini adalah:

- a. mengidentifikasi strategi dan langkah-langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memulihkan kondisi perekonomian selama dan terutama pasca pandemi
- b. mengetahui hasil implementasi strategi dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka pemulihan kondisi perekonomian tahun 2020.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian berbasis *mixed method* untuk mendiagnosa dan menganalisis dampak kebijakan. dengan mengacu pada data sekunder, yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk angka, tabel, grafik, diagram, gambar, dan sebagainya sehingga data tersebut lebih informatif bagi pihak lain. Metode kuantitatif diterapkan untuk menganalisis strategi pemerintah yang datanya berbentuk angka-angka. Sedangkan dengan mengutilitaskan *in-depth interview approach*, penelitian ini berfokus pada ruang lingkup informan pilihan yakni dari perspektif pelaku ekonomi.

Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini dimana data primer terdiri atas informasi yang diperoleh dari tangan pertama peneliti pada variabel yang diacu (Hakim, 2009), sedangkan data sekunder adalah data dari sumber yang sudah ada seperti publikasi pemerintah, arsip perusahaan, analisis industri, website, internet, dan lain-lain. Variabel kuantitatif dan variabel kualitatif dalam penelitian ini masing-masing adalah tingkat ketercapaian pertumbuhan ekonomi dan strategi pemulihan ekonomi.

Data sekunder yang digunakan dalam studi ini antara lain *time series* bulanan dan tahunan dari Bank Indonesia yang diakses melalui situs resmi di website [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) serta *time series* bulanan dan tahunan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui situs resminya di [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).

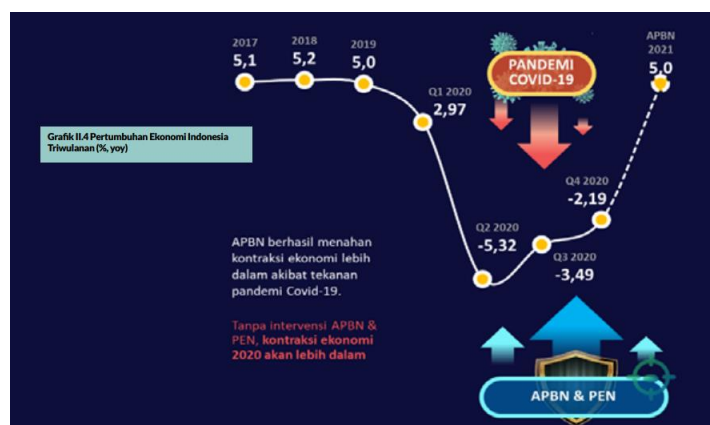
Menurut Kairupan (2015) pengumpulan data untuk studi kasus berupa wawancara, dokumen, observasi, rekaman arsip, dan perangkat fisik. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan/*field research* dan penelitian kepustakaan/*library research* jika dilihat dari teknik pengumpulan data yang dipakai. Pengumpulan data kuantitatif mengenai tingkat pertumbuhan ekonomi ataupun data kualitatif mengenai strategi pemulihan ekonomi dilakukan dari lapangan, yaitu berbagai media publikasi, pengamatan langsung oleh peneliti, serta kajian dokumen yang relevan.

Metode analisa yang dipilih dalam studi ini adalah deskriptif yang bersifat kualitatif. Metode ini dijalankan dengan cara menganalisis berbagai sumber tulisan dan penelitian yang telah ada. Data-data angka pada penelitian ini diperoleh melalui website resmi OJK dan Bank Indonesia. Data yang digunakan adalah data-data tahun 2010 sampai dengan tahun 2020.

Penulis melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dari berbagai sumber, melakukan klasifikasi, dan dokumentasi selanjutnya menganalisis hubungan diantara data tersebut. Penulis juga menyajikan data penelitian kedalam bentuk visual tabel atau grafik sehingga mudah dipahami.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi COVID-19 di Indonesia menjadi penyebab utama penurunan kinerja ekonomi. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahu membahu menangani pandemi ini baik dari sektor kesehatan maupun ekonomi.



Gambar 4. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia  
Sumber: Bank Indonesia 2020

Dalam rangka mencegah penyebaran virus Covid-19 secara massif maka pemerintah mengambil kebijakan pembatasan yang dilakukan beberapa kali. Pembatasan pertama dimulai awal Maret 2020 dan mengakibatkan banyak usaha mengalami perlambatan ekonomi dan diperparah dengan menurunnya daya beli masyarakat.

Turunnya daya beli yang menyebabkan perlambatan ekonomi juga berpengaruh pada kesulitan pembayaran angsuran kredit yang berdampak pada naiknya angka *Non-Performing Loan* perbankan di Indonesia (Nansi, 2019). BPS telah melakukan survei yang hasilnya dipublikasikan pada 15 September 2020 mengulas dampak pandemi Covid-19 baik pada perusahaan yakni penurunan pendapatan baik pada Perusahaan kecil (usaha mikro dan kecil (UMK)) dan perusahaan menengah besar (UMB). Penurunan pendapatan yang terjadi pada perusahaan membuat perusahaan harus mengurangi jumlah karyawan dan pengurangan jumlah karyawan ini berdampak pada kualitas kredit perbankan.

*“... pelaku usaha di Indonesia itu mayoritas UMKM. Jadi ada 99 persen pelaku usaha UMKM. Dan 98 persen atau mayoritasnya itu level mikro dan ultramikro, ini yang paling berdampak karena biasanya dikerjakan sendiri atau (oleh) anggota keluarga, dan pendapatannya biasanya harian. Karena itu begitu wabah corona ini merebak, dan ada kebijakan yang social distancing untuk mengurangi penularan, ini betul- betul UMKM sudah terganggu.”* (Pria, 40-45 tahun, UMKM tahu, >10 tahun wirausaha, narasumber 3)

*“Melemahnya kondisi perekonomian memang merupakan dampak dari melemahnya kondisi perekonomian dunia. Melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia mengakibatkan permintaan barang akan menjadi menurun dan pertumbuhan investasi juga akan terhambat, dimana diakibatkan karena melemahnya daya beli masyarakat,”* (Pria, 40-50 tahun, pemilik lapak, 15 tahun usaha, narasumber 6).

Kebijakan keuangan pemulihan ekonomi nasional ditetapkan oleh pemerintah beserta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terdiri atas berbagai jenis skema guna mempercepat pemulihan ekonomi, agar kondisi moneter negara tetap sehat.



Gambar 5. Kebijakan Keuangan Pemulihan Ekonomi Nasional  
Sumber: Bank Indonesia 2020

Kebijakan pemberian stimulus bagi perekonomian bagi perbankan mulai dilaksanakan oleh OJK pada Maret 2020. Dengan diterapkannya kebijakan ini OJK berharap kualitas kredit dapat dipertahankan dalam kondisi sehat. Perbankan dituntut untuk proaktif mengidentifikasi debitur-debitur yang terkena dampak akibat pandemi Covid-19 dan memberikan bantuan yang tepat sasaran. Bantuan pemberian stimulus terdiri antara lain penilaian kualitas kredit, pembiayaan, penyediaan dana lain, dan restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit menjadi lancar (Otoritas Jasa Keuangan, 2020b).

Sedangkan bagi lembaga jasa keuangan non-bank, OJK mengeluarkan lima kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19. Kebijakan ini mencakup rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham secara terbuka maupun secara elektronik, transaksi material dan perubahan kegiatan usaha, serta perintah tertulis untuk penanganan permasalahan perbankan (Otoritas Jasa Keuangan, 2020c).

Program pemulihan ekonomi nasional juga dilakukan dengan pelaksanaan penempatan dana dan pemberian subsidi bunga yang telah menjadi kesepakatan bersama Pemerintah dan OJK melalui penandatanganan SKB Menteri Keuangan dan ketua dewan komisioner OJK. Subsidi bunga ini diberikan kepada UMKM yang memenuhi kriteria.

Kebijakan penempatan dana pada bank peserta dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan memberikan bantuan likuiditas pada bank umum, BPR dan perusahaan pembiayaan yang telah melakukan restrukturisasi kredit dan/atau memberikan tambahan kredit modal kerja (Otoritas Jasa Keuangan, 2020a). Kebijakan diambil oleh pemerintah agar kegiatan ekonomi dapat tetap berjalan. OJK juga menginisiasi inisiatif strategis untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Inisiatif tersebut terdiri dari 6 inisiatif yang berfokus pada upaya mempertahankan sektor jasa keuangan yang tetap stabil. Selain itu inisiatif strategis ini diharapkan bisa menjadi katalis dalam mempercepat program pemerintah pada pemulihan perekonomian nasional.

Pemerintah juga mendorong peningkatan literasi keuangan dan memperluas akses keuangan bagi masyarakat. Dengan penguatan literasi dan akses keuangan ini diharapkan terbentuk integrasi digitalisasi antara sektor jasa keuangan dengan sektor riil guna menopang pertumbuhan ekonomi (OJK, 2020a).

Pelaksanaan kebijakan fiskal melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Anggaran pendapatan dan belanja negara ini mengemban fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi. Kebijakan fiskal juga berfokus membantu pelaku ekonomi yang terdampak pandemi. Selain stimulus ekonomi kebijakan kedua yakni kebijakan moneter fokus kebijakan juga diarahkan kepada pemeliharaan stabilitas sistem keuangan termasuk melakukan pengendalian jumlah uang beredar yang menjadi tanggung jawab Bank Indonesia.

Skema stimulus penanganan ekonomi selama pandemi dengan mengeluarkan stimulus kebijakan PC-PEN. Stimulus kebijakan PEN ini memiliki dua dimensi utama, yakni penanganan kesehatan sebagai sumber utama penyebab pandemi, dan penanganan perekonomian sebagai efek domino dari adanya pandemi. Pada tahun 2020 sektor kesehatan dialokasikan oleh pemerintah APBN senilai Rp99,50 triliun, sedangkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mendapatkan alokasi anggaran Rp595,70 triliun atau total alokasi sebesar Rp695,2 triliun atau sekitar 4,2 persen PDB. Program PEN ini menetapkan 4 modalitas yang merupakan instrumen APBN yaitu penyertaan modal negara, penempatan dana pemerintah di perbankan, investasi pemerintah, dan penjaminan.

Kebijakan fiskal pembangunan ekonomi ditetapkan melalui tiga pendekatan yakni: 1. Kebijakan fiskal untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi, menggerakkan sektor riil, serta meningkatkan investasi dan daya saing, 2. Pengelolaan fiskal yang sehat terefleksi dari pendapatan yang optimal, belanja yang berkualitas, dan pembiayaan yang efisien dan berkelanjutan, dan 3. Kebijakan fiskal juga untuk mendorong perbaikan neraca keuangan pemerintah yaitu meningkatnya aset dan ekuitas, serta terkendalinya liabilitas. Kebijakan fiskal diarahkan untuk fasilitasi adopsi perkembangan *ICT (digitalisasi, e-commerce, internet of things, AI dan AR)* serta mendukung transformasi industrialisasi.

Pemerintah juga memberikan perhatian kepada dunia usaha khususnya dalam kebijakan perpajakan dan cukai dengan mengeluarkan berbagai kebijakan meliputi: 1. Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap 2. Perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) 3. Perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan 4. Pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan pembebasan/keringanan bea masuk. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia (BI) membeli SUN dan SBSN di pasar perdana. Selain itu BI juga memberikan pinjaman likuiditas khusus kepada bank sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas.

Tujuan dari penjaminan Program PEN untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi nasional melalui BUMN. Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat membantu kegiatan ekonomi masyarakat dapat terus berjalan sehingga pemulihan ekonomi dapat segera dicapai. Sejauh ini kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah beserta OJK mampu menahan nilai NPL perbankan nasional berada dibawah angka 5 persen.

Dari berbagai stimulus program yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan wawancara untuk mengetahui kesesuaian dan ketercapaian kebijakan terutama terhadap UMKM. Wawancara mendalam dengan metode semi struktur ini dilakukan pada seluruh narasumber (sampel) penelitian ini. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi secara mendalam mengenai perspektif narasumber terhadap **kebijakan pemerintah pasca pandemi**. Peneliti menggunakan transkrip untuk merekam/mencatat setiap wawancara dengan para narasumber.

Tabel 4.1 Narasumber Wawancara (UMKM 3-5 narasumber/kategori)

No	Nama	Peran	Durasi
1	Narasumber 1	Pemilik warung tegal/makanan	25 menit
2	Narasumber 2	Pimpinan jasa pengantaran barang	30 menit
3	Narasumber 3	Pemilik usaha rumah tangga industri tahu-tempe	20 menit
4	Narasumber 4	UMKM makanan ringan	75 menit
5	Narasumber 5	Penjahit pakaian	45 menit
6	Narasumber 6	Pemilik lapak pasar	60 menit
7	Narasumber 7	Agen beras dan air minum kemasan	45 menit

PBD nasional disumbang oleh UMKM sebagai kontributor terbanyak. Namun di lain pihak UMKM adalah pihak yang terdampak cukup signifikan akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Pemerintah menetapkan beberapa kebijakan untuk membantu sektor UMKM selama masa pandemi:

1. Melindungi: Subsidi Bunga/Margin KUR dan Subsidi Bunga Non-KUR

Bertujuan memberikan kemudahan pembayaran angsuran pokok dan bunga bagi UMKM penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 3 persen bagi UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Skema ini juga untuk menjaga keberlangsungan usaha yang akan mendukung tetap tumbuhnya ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

*“Program KUR sangat membantu permodalan usaha dimana selama pandemi usaha tidak lancar dengan adanya bantuan modal memperingan beban wirausahawan untuk bangkit berusaha lagi.”*  
(Wanita, 30-35 tahun, pemilik lapak, 5 tahun usaha, narasumber 6).

*“Program yang sangat berpihak pada masyarakat kecil, namun aksesnya masih tergolong sulit”*  
(Pria, 30-35 tahun, agen beras, 8 tahun usaha, narasumber 7).

Selain subsidi bunga KUR, program PEN juga memberikan subsidi bunga non-KUR untuk meningkatkan ekonomi pelaku UMKM. Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam upaya mendukung kestabilan ekonomi negara melalui program PEN. Penerima subsidi adalah pelaku usaha

baik perseorangan maupun kelompok usaha ataupun badan usaha yang sedang menerima pembiayaan. Penerima subsidi terdiri atas debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan maupun debitur Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah.

*“Subsidi bunga KUR dapat membantu UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan murah.”* (Pria, 40-45 tahun, pengusaha jasa transportasi, 12 tahun usaha, narasumber 2).

*“Subsidi bunga KUR merupakan salah satu stimulus yang efektif untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 dan memulihkan sektor UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.”* (Pria, 55 tahun, pengusaha warung makan, 20 tahun usaha, narasumber 1).

*“Dengan subsidi bunga KUR, UMKM bisa mendapatkan kredit dengan syarat yang lebih ringan dan bunga yang lebih murah.”* (Wanita, 35-40 tahun, penjahit pakaian, >10 tahun usaha, narasumber 5).

2. Pelaksanaan PEN: Pembiayaan Investasi kepada Koperasi Melalui LPDB dan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM).

Program PEN juga memberi dukungan dalam Pembiayaan Investasi kepada Koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). Pembiayaan ini digunakan sebagai modal kerja dan/atau investasi. Apabila penyaluran dilakukan kepada koperasi, LPDB-KUMKM dapat menyalurkan pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi primer maupun sekunder. Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam bentuk uang dari pemerintah yang diberikan kepada UMKM yang terdampak pandemi yang bersumber dari APBN.

*“Program ini sangat membantu meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama masa pandemi.”* (Pria, 55-60 tahun, pengrajin tahu, 30 tahun usaha, narasumber 5).

*“PEN menggerakkan UMKM yang ada dan meningkatkan kinerjanya mengingat pelaku UMKM kebanyakan adalah masyarakat dengan modal kecil dan kondisi ekonomi menengah.”* (Wanita, 30-35 tahun, pemilik lapak, 5 tahun usaha, narasumber 6).

3. Penempatan Dana Pemerintah di Perbankan

Penempatan pemerintah pada perbankan dalam hal ini bank umum dengan tujuan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional dan menciptakan peluang bagi UMKM dan koperasi. Dana hasil penempatan oleh pemerintah ini diharapkan dapat disalurkan sebagai kredit bunga murah yang diperuntukkan debitur bank terutama UMKM, non-UMKM, koperasi, dan lembaga keuangan. Program penempatan dana pemerintah di perbankan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan penempatan dana sebelumnya yaitu restrukturisasi kredit.

4. Penyertaan Modal: Insentif PPh Final UMKM DTP

Dalam sektor pajak untuk meringankan beban para pelaku UMKM di tengah pandemi COVID-19, pemerintah menstimulasi pemulihan ekonomi dengan menetapkan regulasi perpajakan untuk mendukung UMKM, yaitu penerapan PPh Final dengan tarif 0,5 persen dari peredaran bruto. Selain itu pemerintah juga memberikan insentif perpajakan berupa PPh Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Ditanggung Pemerintah (PPh Final UMKM DTP).

*“Insentif PPh final UMKM ditanggung Pemerintah cukup berdampak positif bagi UMKM. Pemberian insentif ini terbukti dapat meringankan beban UMKM dan dapat menstabilkan ekonomi. Buktinya bisa terlihat secara makro indikator perekonomian.”* (Pria, 30-45 tahun, distributor, 10 tahun usaha, narasumber 4).

*“Insentif ini bahasa sederhananya, pajak untuk UMKM dibayari pemerintah. Jadi UMKM gratis PPh final sebagai bentuk bantuan dan dukungan guna meringankan beban pelaku usaha.”* (Pria, 55 tahun, pengusaha warung makan, 20 tahun usaha, narasumber 1).

##### 5. Penjaminan Kredit Modal Kerja.

Pemerintah terus berusaha memulihkan perekonomian melalui kebijakan Program PEN. Melalui program ini pemerintah memberikan jaminan kepada pelaku UMKM dan koperasi yang kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi COVID-19 untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Untuk mencapai tujuan ini pemerintah memfasilitasi pelaku UMKM dan koperasi dengan PT. Jamkrindo dan PT. Askrindo yang akan menjamin kewajiban/kredit pinjaman modal kerja yang diterima oleh pelaku UMKM dan koperasi. Penjaminan ini dilakukan tetap dengan menilai kemampuan keuangan negara dan kesinambungan fiskal. Dengan adanya jaminan dari PT. Jamkrindo dan PT. Askrindo diharapkan perbankan lebih agresif dalam menyalurkan kredit terutama kepada pelaku UMKM dan koperasi sehingga fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dapat berjalan.

*“... penempatan dana untuk bank-bank yang terdampak restrukturisasi dalam program pemulihan ekonomi nasional dimaksud harus dapat memberikan manfaat nyata bagi para pelaku usaha. Terutama yang bergerak di sektor industri padat karya agar tetap mampu beroperasi untuk mencegah terjadinya PHK secara masif.”* (Pria, 55-60 tahun, pengrajin tahu, 30 tahun usaha, narasumber 5).

Untuk mendukung pelaksanaan program Penjaminan Pemerintah ini, Pemerintah menanggung pembayaran Imbal Jasa Penjaminan (IJP) kepada PT Jamkrindo dan PT Askrindo, dan menyediakan anggaran dana cadangan penjaminan. Pemerintah juga turut menjaga kapasitas PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo dengan memberikan dukungan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara, *counter guarantee*, *loss limit*, atau dukungan pembagian risiko lainnya.

Sebagai strategi pemulihan ekonomi berbagai kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah. Pada awal pandemi COVID-19 kebijakan yang diambil pemerintah adalah realokasi anggaran berupa penghematan belanja dan realokasi belanja dan dialihkan pada penanganan COVID-19 (Estro, 2020).

Dalam rangka pencegahan virus Covid-19 Pemerintah menetapkan peraturan pembatasan sosial namun di sisi lain berdampak negatif yakni membuat kegiatan perekonomian produksi, distribusi, dan konsumsi terhambat. Situasi ini diatasi dengan penggunaan teknologi digital. Aktivitas perekonomian tetap berjalan dengan tetap menjalankan peraturan pembatasan tanpa harus memerlukan tatap muka via *e-commerce* berkat keterlibatan teknologi digital (Nansi, et al., 2023). Penggunaan *platform e-commerce* pun kian populer di Indonesia dalam rangka membangkitkan perekonomian global.

Dewasa ini bisnis-bisnis yang bergerak di ranah digital telah banyak berkontribusi dalam menyelamatkan perekonomian dunia di masa pandemi (UNCTAD, 2020). United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) mengkonfirmasi peningkatan transaksi *e-commerce* pada perdagangan ritel global selama pandemi adalah dari 14% pada 2019 menjadi sekitar 17% pada 2020 setelah pandemi Covid-19. Penggunaan *e-commerce* yang kian meningkat selama pandemi karena adanya perubahan perilaku konsumen yang harus survive di tengah keterbatasan interaksi. Budaya penggunaan *e-commerce* ini terbukti juga oleh capaian transaksi yang signifikan perusahaan-perusahaan *e-commerce* selama masa pandemi.

Namun demikian kemajuan industri *e-commerce* ini belum mampu secara signifikan perekonomian seperti sedia kala. Akan tetapi kontribusi penjualan *e-commerce* yang melonjak sejak tahun 2019 mengindikasikan ketepatan dan peluang bisnis yang akan meningkatkan keuntungan dari transaksi pada konsumen, serta menggiatkan perdagangan “*business-to-business*” (B2B).

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah Indonesia telah mengambil lima kebijakan dalam rangka pemulihan perekonomian selama dan pasca pandemi dengan menitikberatkan budaya digitalisasi. Kebijakan tersebut antara lain melindungi, pelaksanaan PEN, penyertaan modal, penempatan dana, dan skema penjaminan. Sesuai dengan tujuan penelitian ini ialah mengetahui hasil implementasi strategi yaitu lima kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sekaligus mengetahui dampak dari kebijakan yang telah diambil. Dari hasil analisis diketahui bahwa strategi yang dilakukan pemerintah berhasil memulihkan kondisi perekonomian Indonesia terutama memasuki digitalisasi perekonomian pasca pandemi. Dari penelitian ini pula terungkap bahwa budaya digital kian meningkat dengan adanya perubahan perilaku konsumen yang disebabkan oleh paparan teknologi semasa pandemi dengan banyak manfaat positif pada masyarakat.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Bank Indonesia. (2020). Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia
- Claesson, A., & Jonsson, A. (2017). *The Confusion of Content Marketing: A Study to Clarify The Key Dimensions of Content Marketing*. Sweden: Högskolan Kristianstad. <http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1112893/FULLTEXT01.pdf>. Diakses 07/07/2023.
- Estro, Dariatno Sihalo. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia, Researchgate, Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Padjadjaran
- Farhanah (2020). UMKM Terdampak Pandemi, Pemerintah dan Swasta Gotong Royong Dorong Pertumbuhan Ekonomi. KOMPAS.com. <https://money.kompas.com/read/2020/09/09/143611226/umkm-terdampak-pandemi-pemerintah-dan-swasta-gotong-royong-dorong-pertumbuhan>. Diakses 07/07/2023
- Febrantara, D. (2020). Bagaimana Penanganan UKM di Berbagai Negara Saat Ada Pandemi Covid-19?. DDTC News. Diakses dari: <https://news.ddtc.co.id/bagaimana-penanganan-ukm-di-berbagai-negara-saat-ada-pandemi-covid-19-20386>
- Hakim, F. (2009). Evaluasi Implementasi Strategi Penurunan Tingkat Non Performing Loan (NPL) di PT Bank Mandiri (Pesero), Tbk. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. Baskara, *Journal of Business and Entrepreneurship* 2(2): 83-92. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/baskara/article/view/6207>
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1): 146-153. Diakses dari: <https://ummaspul.e-journal.id/Edupsyscouns/article/view/423>
- Helen, Sri Mintarti, Fitriadi. (2017). Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja serta Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Kesempatan Kerja, *Jurnal INOVASI*, Vol 13 No 1 Tahun 2017, Samarinda, UMMUL
- Kairupan, D. Yoel Immanuel. (2015). Evaluasi Implementasi Strategi Penurunan Non Performing Loan (NPL) PT Bank X (Pesero), Tbk. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Khairani Siregar. (2009). Analisis Determinan Konsumsi Masyarakat Indonesia, Medan, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatra Utara
- Nansi, M. R. (2019). ANALISIS PENYEBAB DAN STRATEGI PENANGANAN NON PERFORMING LOAN (NPL) PERBANKAN INDONESIA 2016. *Jurnal Optimal*, 16(1), 95-120.
- Nansi, M. R., Arbintarso, E. S., & Rahayu, S. S. (2023). ANALISIS DAMPAK PEMASARAN ONLINE TERHADAP PENINGKATAN PENJUALAN DAN RASIO-RASIO KEUANGAN. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 19(2), 184-197.
- Otoritas Jasa Keuangan . (2020). Kebijakan Stimulus dan Relaksasi
- Sadono, Sukirno. (2008). Makro Ekonomi: Teori Pengantar (Edisi Ketiga), 2008, Jakarta, Rajawali Pers
- Siaran Pers. (17 April 2020). Pemerintah Waspada Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Silpa, Hanoatubun. (2020). Dampak Covid 19 terhadap Perekonomian Indonesia, *EduPsyCouns Journal*, Volume 2 nomor 1, Universitas Kristen Satya Wacana.